

EVALUASI PENGEMBANGAN WILAYAH DALAM MENINGKATKAN KAWASAN AGROPOLITAN DI KABUPATEN TABALONG

(Studi Wilayah Pembangunan Utara)

AdityaPula Nugraha

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Wilayah Pembangunan Utara adalah salah satu wilayah pembangunan di Kabupaten Tabalong dengan potensi dominan yang dikembangkan adalah sektor pertanian/agribisnis. Sektor pertanian masih menjadi basis perekonomian di Kabupaten Tabalong dengan persentase kontribusi PDRB tanpa minyak bumi dan batubara tahun 2011 yaitu sebesar 37,03%. Pembangunan pertanian yang merupakan basis perekonomian akan berdampak luas pada perekonomian masyarakat, oleh karena itu peningkatan pembangunan pertanian melalui strategi program pengembangan wilayah agribisnis diharapkan dapat meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat di Wilayah Pembangunan Utara. Namun pada pelaksanaan pengembangan wilayah agribisnis yang telah berjalan masih menemui beberapa kendala diantaranya migrasi penduduk yang terjadi, SDM yang masih rendah, produktivitas hasil pertanian yang belum maksimal serta keterbatasan sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil penelitian ini faktor migrasi penduduk, potensi ekonomi dan sarana prasarana sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pengembangan agribisnis di Wilayah Pembangunan Utara. Evaluasi berdasarkan faktor migrasi penduduk yang terjadi menunjukkan semakin tinggi jumlah migrasi penduduk keluar yang terjadi menandakan rendahnya potensi ekonomi dan minimnya sarana prasarana di wilayah tersebut. Evaluasi berdasarkan faktor potensi ekonomi menunjukkan sektor pertanian serta perkebunan menjadi sumber pendapatan masyarakat Wilayah Pembangunan Utara dan telah mampu mengurangi angka pencari kerja sebesar 1.8%. Sedangkan evaluasi berdasarkan faktor sarana prasarana masih memerlukan peningkatan sarana prasarana yang ada. Peningkatan sarana prasarana akan berbanding lurus dengan peningkatan hasil pertanian dan ini juga berarti peningkatan tingkat pendapatan masyarakat petani. Selain itu terdapat kendala-kendala yang dihadapi yang meliputi permasalahan dari faktor migrasi penduduk, potensi ekonomi, sarana prasarana, aspek manajemen dan aspek hukum. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan upaya Pemerintah beserta instansi terkait melalui kebijakan-kebijakan ataupun akselerasi program serta peran serta petani/ masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pengembangan wilayah agribisnis di Wilayah Pembangunan Utara Kabupaten Tabalong.

Kata Kunci : Agribisnis, Migrasi Penduduk, Potensi Ekonomi dan Sarana Prasarana.

1. Latar Belakang

Amanat UUD 1945 dalam pembukaannya disebutkan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat berbunyi bahwa "Pemerintahan Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Kesejahteraan masyarakat tidak dapat dicapai apabila tidak didukung oleh kemampuan dan sumber daya manusia dalam memanfaatkan segala potensi yang

dimiliki. Penyebab utama suatu negara tidak maju atau menjadi terbelakang adalah karena dikelola dengan tidak benar (*undermanaged*). Kemampuan suatu bangsa menjadi *causa prima* bagi kemajuan bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, perencanaan wilayah dengan manajemen yang baik sangat diperlukan. Perencanaan dibutuhkan agar bangsa tersebut dapat mengangkat dirinya sendiri dari keterbelakangan menuju kesejahteraan masyarakat yang baik.

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya mencari potensi-potensi yang ada untuk dikembangkan sehingga dapat menyebabkan *multiplier effect* bagi wilayah disekitarnya, tidak terkecuali Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong.

Kecamatan Haruai, Upau, Muara Uya, Jaro dan Bintang Ara sebagai sebuah kesatuan wilayah di Kabupaten Tabalong terus melakukan pembangunan dengan mengupayakan pembagian sektor potensial secara parsial dalam pengembangan wilayah menuju pembangunan yang bersinergis untuk wilayah pembangunan Utara. Oleh karena itu, perlu strategi pengembangan yang tepat guna mengembangkan dan menggali potensi-potensi yang ada dalam suatu wilayahnya. Pemilihan sektor/subsektor unggulan dalam hal ini sektor pertanian sebagai basis pengembangan wilayah dan kerjasama antar pusat pertumbuhan dapat menjadi salah satu solusinya.

Pengembangan wilayah budidaya bidang pertanian melalui pendekatan sentra agropolitan merupakan konsep yang cocok dengan potensi yang dimiliki oleh kawasan pengembangan Wilayah Pembangunan Utara Kabupaten Tabalong, karena sektor pertanian masih menjadi sektor basis perekonomian di Kabupaten Tabalong dengan persentase kontribusi yang terbesar PDRB tanpa minyak bumi dan batubara pada tahun Anggaran 2011 yaitu sebesar 37,03%. Selain itu, pembangunan pertanian yang merupakan basis perekonomian akan berdampak luas pada perekonomian masyarakat, oleh karena itu peningkatan pembangunan pertanian melalui strategi program pengembangan wilayah agribisnis ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat

perekonomian masyarakat di Wilayah Pembangunan Utara.

Pelaksanaan program pengembangan wilayah agribisnis di Wilayah Pembangunan Utara dengan berdasarkan besarnya persentase kontribusi hasil pertanian terhadap daerah memang dinilai cukup baik, namun meski demikian masih terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi Adapun kendala yang dimaksud diidentifikasi sebagai berikut:

- (1) Migrasi penduduk yang terjadi dan hanya berpusat pada pusat wilayah pengembangan,
- (2) Sumber daya manusia dibidang agribisnis yang masih rendah
- (3) Produktivitas hasil pertanian yang masih belum maksimal,
- (4) Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung untuk kelancaran penanganan hasil produktivitas pertanian.
- (5) Kurangnya sosialisasi Pemerintah mengenai program pengembangan wilayah agribisnis di Wilayah Pembangunan Utara.

Berdasarkan kelima permasalahan yang telah dikemukakan tersebut ternyata sangat dominan mempengaruhi terhadap rencana pengembangan/ pertumbuhan wilayah khususnya pengaruh terhadap kawasan agropolitan. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi pengembangan wilayah perlu dilihat dari beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan suatu wilayah. Faktor-faktor tersebut adalah migrasi penduduk, potensi ekonomi dan sarana prasarana (Cornelis Lay, 1993:53 dan Williamson dalam Friedman & Alonso (ed), 1975:166).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah dapat dirumuskan yaitu "Bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah dalam meningkatkan kawasan agropolitan di Wilayah Pembangunan Utara Kabupaten Tabalong dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi ? " serta "Apa yang menjadi kendala pada pelaksanaan pengembangan wilayah dalam meningkatkan kawasan

agropolitan di Wilayah Pembangunan Utara Kabupaten Tabalong ? "

3. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Wilayah

Di dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang "Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional".

Menurut Pamudji (2001 : 16) "Wilayah adalah suatu lingkungan geografis-sosiologis tertentu yang lebih merupakan bagian dari suatu lingkungan yang lebih besar".

Menurut Rustiadi (2006) "Wilayah didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu dimana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional". Jadi batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis. Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk bentuk kelembagaan.

Berdasarkan pengertian yang berirama diatas dapat disimpulkan bahwa istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu.

b. Pengertian Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah merupakan suatu proses untuk mengarahkan segala potensi wilayah yang bersangkutan untuk didayagunakan secara terpadu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Proses pendayagunaan itu biasanya berupa kombinasi dari pengerahan beberapa faktor yang saling menunjang terhadap satu sama lain sehingga dapat diperoleh hasil tertentu. Menurut Taliziduhu Ndaraha (2002:126) "Pengembangan wilayah adalah kombinasi antara pendayagunaan potensi manusia untuk mengolah sumber daya alam yang terdapat dalam wilayahnya".

Jadi dapat diartikan pengembangan wilayah adalah suatu usaha untuk mengeksplorasi suatu sumber energi tertentu yang

dari hasil-hasilnya boleh diharapkan akan dapat menunjang usaha peningkatan kesejahteraan rakyat.

Prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan wilayah adalah : Sebagai *growth center*, pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah, namun harus diperhatikan sebaran atau pengaruh (*spread effect*) pertumbuhan yang ditimbulkan bagi wilayah sekitarnya; Pengembangan wilayah memerlukan upaya kerjasama pengembangan antar daerah dan menjadi persyaratan utama bagi keberhasilan pengembangan wilayah; Pola pengembangan wilayah bersifat integral; Dalam pemetaan *strategic development region*, satu wilayah pengembangan diharapkan mempunyai unsur-unsur strategis antara lain berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan infrastruktur yang saling berkaitan dan melengkapi sehingga dapat dikembangkan secara optimal dengan memperhatikan sifat sinergisme diantaranya (Direktorat Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi, 2003).

c. Teori Pusat Pertumbuhan Wilayah

Teori tempat pemusatan pertama kali dirumuskan oleh Christaller (1933) dan dikenal sebagai teori pertumbuhan perkotaan yang pada dasarnya menyatakan bahwa "Pertumbuhan kota tergantung spesialisasinya dalam fungsi pelayanan perkotaan, sedangkan tingkat permintaan akan pelayanan perkotaan oleh daerah sekitarnya akan menentukan kecepatan pertumbuhan kota (tempat pemusatan) tersebut".

Terdapat empat faktor yang menyebabkan timbulnya pusat-pusat pelayanan yaitu faktor lokasi ekonomi, faktor ketersediaan sumberdaya, kekuatan aglomerasi dan faktor investasi pemerintah.

Teori pusat pertumbuhan juga ditopang oleh kepercayaan bahwa kekuatan pasar bebas melengkapi kondisi terjadinya *trickle down effect* (dampak penetes ke bawah) dan menciptakan *spread effect* (dampak penyebaran) pertumbuhan ekonomi dari perkotaan ke perdesaan. Menurut Stohr (1981) dalam Mercado (2002), konsep pusat

pertumbuhan mengacu pada pandangan ekonomi neo-klasik. Pembangunan dapat dimulai hanya dalam beberapa sektor yang dinamis, mampu memberikan *output* rasio yang tinggi dan pada wilayah tertentu, yang dapat memberikan dampak yang luas (*spread effect*) dan dampak ganda (*multiple effect*) pada sektor lain dan wilayah yang lebih luas.

d. Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Wilayah

Menurut Lay (1993:53) indikator yang mempengaruhi pengembangan wilayah adalah tingkat kesejahteraan penduduk, kualitas pendidikan, pola penyebaran dan konsentrasi investasi serta ketersediaan sarana prasarana.

Jadi berdasarkan pernyataan Lay diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator yang mempengaruhi dalam pengembangan wilayah itu terbagi atas :

- a. Fisik ; Ketersediaan sarana sosial ekonomi seperti sarana kesehatan, pendidikan dan sarana perekonomian.
- b. Ekonomi ; Kemampuan ekonomi penduduk yang terlihat dari tingkat kesejahteraan keluarga pada masing-masing daerah.
- c. Sosial ; Jumlah penduduk dan kualitas penduduk.

Williamson menyatakan bahwa ketidakmerataan pertumbuhan antar wilayah akan cenderung semakin membesar khususnya pada tahapan awal terjadinya suatu proses pembangunan.

Secara umum beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab terjadinya peningkatan ketidakmerataan antar wilayah tersebut yaitu : (Williamson dalam Friedman dan Alonso (ed), 1975:166)

- Migrasi penduduk yang produktif (usia kerja) dan memiliki keahlian dari daerah-daerah kurang berkembang ke daerah-daerah yang telah berkembang
- Investasi cenderung dilakukan di daerah yang telah berkembang karena faktor pasar dimana keuntungannya relatif besar,
- Kebijakan pemerintah, cenderung mengakibatkan terkonsentrasinya sarana dan prasarana di daerah yang telah berkembang

- Pola perdagangan dan kegiatan perdagangan didominasi oleh industri-industri di daerah yang telah berkembang.

e. Pengertian Evaluasi

Istilah evaluasi sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2000 : 220). Sedangkan menurut pengertian istilah “Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan” (Yunanda : 2009).

Pemahaman mengenai pengertian evaluasi dapat berbeda-beda sesuai dengan pengertian evaluasi yang bervariasi oleh para pakar evaluasi. Menurut Stufflebeam dalam Lababa (2008): Evaluasi adalah “*the process of delineating, obtaining and providing useful information for judging decision alternatives*”. Artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak *decision maker* untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Djaali dan Pudji (2008 :1) “Evaluasi sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi”. Sedangkan menurut Ahmad (2007 : 133) “Evaluasi diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan, kegiatan, keputusan, proses, orang, obyek dll.) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian”.

Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik benang merah tentang evaluasi yakni evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat

dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Karenanya, dalam keberhasilan ada dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu efektifitas dan efisiensi.

f. Model-Model Evaluasi

➤ Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*)

Stufflebeam dan Shinkfield (1985) adalah ahli yang mengusulkan pendekatan yang berorientasi kepada pemegang keputusan. Sebagai pedoman kerja untuk melayani para manajer dan administrator, ia membagi evaluasi menjadi empat macam, yaitu:

- 1) *Context evaluation to serve planning decision.* Konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan program.
- 2) *Input evaluation, structuring decision.* Evaluasi ini menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan. Bagaimana prosedur kerja untuk alternatif mencapainya.
- 3) *Process evaluation, to serve implementing decision.* Evaluasi proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan. Sejauh mana rencana telah diterapkan? Apa yang harus direvisi? Begitu pertanyaan tersebut terjawab, prosedur dapat dimonitor, dikontrol, dan diperbaiki.
- 4) *Product evaluation, to serve recycling decision.* Evaluasi produk untuk menolong keputusan selanjutnya. dicapai? Apa hasil yang telah dicapai? Apa yang dilakukan setelah program berjalan? (Stufflebeam dalam Widoyoko (2009 : 118))

➤ Model Evaluasi UCLA

Menurut Alkin seperti dikutip Farida Yusuf TN (2008 : 15) menulis tentang kerangka kerja evaluasi yang hampir sama dengan model CIPP. Alkin mengemukakan lima macam evaluasi, yakni:

- 1) Sistem *assesment*, yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi sistem.
- 2) Program *planning*, membantu penilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program.
- 3) Program *implementation*, yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang direncanakan.
- 4) Program *improvement*, yang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja atau berjalan. Apakah menuju pencapaian tujuan, adakah hal-hal atau masalah-masalah baru yang muncul tak terduga.
- 5) Program *certification*, yang memberi informasi tentang nilai atau guna program.

g. Konsep Kawasan Agrolitan

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang :

“Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem pemukiman dan sistem agribisnis.” (Pasal 1 Ayat 24).

Berdasarkan Undang-Undang tersebut agropolitan merupakan suatu pendekatan pembangunan melalui gerakan masyarakat dalam membangun ekonomi berbasis pertanian (agribisnis) secara terpadu dan berkelanjutan pada kawasan terpilih melalui pengembangan infrastruktur perdesaan yang mampu melayani, mendorong dan memacu pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya.

Suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi suatu kawasan sentra produksi

pangan (agropolitan) harus dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Daya dukung SDA dan potensi fisik yang memungkinkan untuk dapat dikembangkan usaha agribisnis berbasis komoditas unggulan.
- 2) Komoditas pertanian yang dapat menggerakkan ekonomi kawasan.
- 3) Perbandingan luas kawasan dengan jumlah penduduk yang ideal untuk membangun sistem dan usaha agribisnis.
- 4) Tersedia prasarana dan sarana produksi dasar yang memadai seperti pengairan, listrik, transportasi, pasar lokal dan sarana produksi lainnya.
- 5) Memiliki suatu lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pelayanan, penghubung dengan daerah/kawasan sekitarnya.

4. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Lokasi dalam penelitian ini adalah Kecamatan Muara Uya dan Kecamatan Haruai. Adapun dasar pertimbangan pengambilan 2(dua) Kecamatan tersebut adalah tersedianya faktor-faktor yang mampu dikonstruksikan untuk kepentingan wilayah penelitian memiliki karakteristik yang sesuai dengan potensi yang dikembangkan.

Adapun sumber data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini dibagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu :

- Data primer

Dalam penelitian ini meliputi data terkait tentang evaluasi pengembangan Wilayah Pembangunan Utara di Kabupaten Tabalong.

Dari data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya akan diamati dan dicatat untuk dijadikan bahan penelitian. Adapun dari data tersebut didapatkan dengan melakukan kontak langsung kepada orang yang dapat memberikan informasi.

- Data sekunder

Merupakan data penunjang dan pelengkap data primer, yang mana di dalam penelitian ini meliputi data dari organisasi/instansi terkait, surat kabar, majalah atau publikasi lainnya.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan melalui :

- Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dan dilaksanakan untuk memperoleh data sekunder berupa dokumen dan pustaka yang relevan dengan penelitian

- Interview (wawancara)

Pengumpulan data dengan mengadakan dialog secara langsung dengan responden untuk mendapatkan data yang diperlukan

- Observasi

Yaitu melihat langsung kondisi lapangan yang dijadikan lokasi/fokus penelitian.

Yang menjadi informan dari Kecamatan yang mewakili Wilayah Pembangunan Utara adalah Camat Muara Uya dan Camat Haruai, Kepala Desa, masing-masing Kecamatan diwakili oleh 1(satu) Kepala Desa, secara keseluruhan berjumlah 2 (dua) orang, Petani/masyarakat, masing-masing Kecamatan diwakili oleh 3 (tiga) orang, secara keseluruhan berjumlah 6(enam) orang. Selain itu untuk memperoleh informasi tambahan, peneliti juga membutuhkan dari informan lainnya diantaranya Bupati Tabalong, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Plt. Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan.

Analisis data adalah memberikan makna pada data yang tersedia, sehingga dengan melihat data tersebut orang lain juga akan mengerti.

Pada penelitian ini menggunakan *content analysis* dengan model interaktif sebagai berikut (Wijono, 1999) :

1) Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, dan observasi terstruktur. Hasil direkam dan disalin dalam bentuk transkrip.

2) Reduksi data dengan pembuatan koding dan kategori

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa.

3) Menyajikan Data

Disajikan dalam bentuk naratif sesuai dengan dan diperkuat oleh photo serta tabel.

4) Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Menyimpulkan hasil penelitian dengan membandingkan pertanyaan penelitian dengan hasil penelitian.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Gambaran Umum Wilayah Pembangunan Utara

Wilayah Pembangunan Utara terdiri dari 5(lima) Kecamatan dan 51 Desa. 5 Kecamatan yang berada di Wilayah Pembangunan Utara adalah Kecamatan Haruai, Upau, Muara Uya, Jaro dan Bintang Ara. Luas seluruh wilayah di Wilayah Pembangunan Utara adalah 2927,43 km² atau 74,2^o% dari luas wilayah di Kabupaten Tabalong.

Jumlah penduduk di Wilayah Pembangunan Utara pada tahun 2011 berjumlah 71.283 jiwa. Yang terdiri dari 36.192 jiwa laki-laki dan 35.091 jiwa perempuan. Sarana Pendidikan terdiri dari 1 TK Negeri, 50 TK Swasta, 92 SD Negeri, 1 SD Swasta, 5 MI swasta, 25 SLTP Negeri, 3 MT's Negeri, 6 MT's Swasta, 5 SLTA Negeri, 11 MA Negeri, 4 MA Swasta. Sarana kesehatan terdiri dari 6 Puskesmas, 50 Puskesmas Pembantu dan 104 Posyandu. Sedangkan Sarana Ibadah terdiri dari 73 Masjid, 162 Langgar, 11 Gereja Protestan dan 1 Gereja Katholik.

Sektor agribisnis merupakan potensi yang dominan dikembangkan di Wilayah Pembangunan Utara. Untuk sektor pertanian diarahkan kepada budidaya padi, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau. Hasil pertanian padi menyumbang 54.476 ton padi atau 40% dari total keseluruhan hasil panen. Hasil produksi kacang kedelai berjumlah 449 Ton atau hampir 82% dari total keseluruhan hasil panen kacang kedelai di Kabupaten Tabalong. Hasil pertanian kacang tanah berjumlah 363 Ton atau 55% dari total keseluruhan hasil panen se Kabupaten, sedangkan kacang hijau dengan luas tanam

174 Ha atau sekitar 69% dari peruntukan lahan pertanian kacang hijau di Kabupaten Tabalong turut memberikan kontribusi 202,7 Ton dari 290 Ton hasil pertanian kacang hijau se- Kabupaten Tabalong.

Sektor perkebunan karet merupakan potensi unggulan di Wilayah Pembangunan Utara selain kopi dan kemiri. Dengan luas arealnya mencapai 30.137 Ha. Perkebunan tanaman karet di Wilayah Pembangunan Utara menghasilkan 20.913 Ton atau sekitar 56% dari hasil produktivitas keseluruhan tanaman karet (37.180 Ton) di Kabupaten Tabalong.

b. Evaluasi Pengembangan Wilayah Agropolitan di Wilayah Pembangunan Utara

Sektor pertanian Kabupaten Tabalong merupakan salah satu sektor yang diandalkan dilihat dari kontribusinya terhadap total PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Fokus pembangunan sektor pertanian yang ditempuh Kabupaten Tabalong adalah mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada kemampuan produksi, keragaman sumberdaya pangan serta kelembagaan dan budaya lokal dan mengembangkan agribisnis yang berorientasi global dengan membangun keunggulan kompetitif produk-produk daerah berdasarkan kompetisi dan keunggulan komparatif SDA dan SDM yang bersangkutan. Dalam mencapai hal tersebut di atas, telah membuat program pengembangan wilayah yang berbasis pendekatan agribisnis di wilayah yang memiliki potensi tersebut, dalam hal ini adalah di Wilayah Pembangunan Utara. Pengembangan agribisnis di setiap daerah berarti membangun titik-titik tumbuh ekonomi daerah berbasis pertanian, dengan harapan satu titik tumbuh akan dapat menstimulasi tumbuh dan berkembangnya titik-titik tumbuh yang lain. Dalam menilai pengembangan Wilayah Pembangunan Utara yang telah berjalan dapat dilihat 3(tiga) faktor yang mempengaruhi, yaitu Migrasi Penduduk, Potensi Ekonomi dan Sarana Prasarannya. (Cornelis Lay, 1993:53 dan Williamson dalam Friedman& Alonso (ed), 1975:166).

➤ Migrasi Penduduk

Perpindahan penduduk di Wilayah Pembangunan Utara khususnya di 2(dua) Kecamatan yang menjadi fokus lokasi penelitian ini mempunyai hasil yang berbeda. Banyaknya jumlah pendatang yang masuk di Kecamatan Muara Uya membuat persentase pertumbuhan penduduk tahun 2010-2011 mengalami peningkatan yaitu sebesar 5,86 %. Sedangkan persentase di Kecamatan Haruai mengalami penurunan percepatan pertumbuhan penduduk yaitu sebesar - 0,51 %. Ada beberapa alasan yang diajukan untuk menggambarkan penurunan percepatan pertumbuhan penduduk di Kecamatan Haruai, selain karena Kecamatan Haruai terletak pada wilayah yang lebih tinggi dari Kecamatan lainnya dan memiliki topografi yang lebih curam di Kecamatan Haruai juga telah terjadinya percepatan migrasi keluar yang cukup signifikan. Penurunan percepatan pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh percepatan pertumbuhan di Kecamatan yang menjadi pusat pengembangan Wilayah Pembangunan Utara yaitu Kecamatan Muara Uya.

Berdasarkan hasil penelitian ini sedikitnya terdapat beberapa alasan utama seseorang meninggalkan daerah asalnya. Namun yang menjadi alasan utama adalah faktor ekonomi. dimana penduduk yang keluar dari Kecamatan Haruai dikarenakan alasan faktor ekonomi/pekerjaan sebesar 46,1%, Perpindahan penduduk Kecamatan Haruai kebanyakan menuju pusat pengembangan Wilayah Pembangunan Utara yaitu Kecamatan Muara Uya, Camat Muara Uya, A. Rahadian Noor, S.STP, M.Si dalam wawancaranya dengan peneliti mengungkapkan:

“Migrasi yang terjadi dari warga beberapa Kecamatan tetangga di Wilayah Pembangunan Utara ke Kecamatan Muara Uya adalah diakibatkan faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini disebabkan karena Kecamatan Muara Uya mempunyai daya tarik tersendiri yaitu tersedianya

berbagai lapangan kerja bagi masyarakat khususnya di sektor pertanian karena sebaran tanah untuk komoditas pertanian tersedia dan memiliki potensi untuk dikelola". (Wawancara Peneliti, 16 Mei 2012).

Adanya keunggulan potensi dan sarana prasarana yang menjadi daya tarik dan pertimbangan penduduk untuk melakukan migrasi menandakan bahwa program pengembangan agribisnis Wilayah Pembangunan Utara secara umum berjalan cukup baik, meski masih meninggalkan tantangan bagi Pemerintah Daerah dikarenakan dengan banyaknya penduduk yang masuk ke Kecamatan Muara Uya berarti menandakan ketidakmerataan pertumbuhan/pembangunan antar wilayah di Kecamatan-Kecamatan yang berada di Wilayah Pembangunan Utara. Selain itu dari analisa diatas dapat disimpulkan pula bahwa semakin tinggi migrasi penduduk keluar yang terjadi dari suatu wilayah menandakan rendahnya potensi ekonomi dan minimnya sarana prasarana yang ada di wilayah tersebut, dan begitu pula sebaliknya

➤ Potensi Ekonomi

Sektor yang dominan dalam perekonomian Kabupaten Tabalong berasal dari sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 60,93% disusul sektor pertanian dengan kontribusi 14,50%. Sedangkan sektor yang dominan tanpa minyak bumi dan batubara menempatkan sektor pertanian sebesar 37,03%. Dengan sektor pertanian yang berkontribusi paling maksimal dalam struktur perekonomian Kabupaten Tabalong dan karakteristik serta potensi wilayah yang ada maka pengembangan wilayah berbasis agribisnis dapat dijadikan potensi ekonomi unggulan sebagai sumber pendapatan masyarakatnya dan secara tidak langsung apabila pendapatan masyarakat meningkat tentu dengan sendirinya akan dapat mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran di Wilayah Pembangunan Utara.

Wilayah Pembangunan Utara memiliki agroklimat yang sesuai untuk pengembangan berbagai macam komoditi pertanian. Potensi ekonomi utama yang berada di Wilayah Pembangunan Utara ini berasal dari sektor pertanian dan perkebunan. Berdasar pada kontribusi hasil pertanian dan perkebunan yang ada maka program pengembangan Wilayah Pembangunan Utara ini sangat mendukung dan sejalan dengan potensi ekonomi wilayah yang dimilikinya. Meski ada beberapa sektor dan komoditas lain yang juga dapat dikembangkan, tetapi dengan potensi ekonomi yang ada telah dinilai mampu membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari angka pencari kerja di Wilayah Pembangunan Utara yang pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 1,8% dibandingkan pada tahun 2010 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong). Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingginya potensi ekonomi suatu wilayah maka akan berdampak pada semakin tinggi pula tingkat pendapatan/ perekonomian masyarakat dan semakin rendahnya tingkat pengangguran yang ada.

➤ **Sarana Prasarana**

Jaringan jalan tiap tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2006 29,6 % jalan yang ada adalah jalan tanah, sedangkan 29,7% adalah jalan aspal. Namun dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 telah terjadi peningkatan pembangunan dimana jalan aspal yang ada bertambah sekitar 84,7 km, sedangkan jalan tanah berkurang 52,1 km. Selain itu terjadi perluasan dan pembukaan jalan baru, hal ini dapat dilihat dari pada tahun 2006 luasan jalan keseluruhan di Wilayah Pembangunan Utara seluas 432,9 km, sedangkan pada tahun 2011 meningkat menjadi 457,22 km. Program pengembangan wilayah agribisnis merupakan salah satu faktor dasar Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan

melakukan peningkatan jaringan jalan di Wilayah Pembangunan Utara.

Di Wilayah Pembangunan Utara tenaga listrik telah masuk hampir ke segala pelosok kecamatan dan desa, dari keseluruhan Kecamatan hanya beberapa wilayah yang belum terlayani ketenagalistrikan nasional namun hal tersebut diatasi Pemerintah Daerah dengan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan *Power Plant* dari PT. MSW yang akan beroperasi pada akhir tahun 2012.

Sarana perekonomian kaitannya untuk memasarkan hasil pertanian terdapat 7(tujuh) pasar umum yang terletak di Kecamatan Haruai dan Muara Uya. Sedangkan untuk memasarkan hewan hasil ternak terdapat 1(satu) pasar hewan di Kecamatan Jaro. Sedangkan dalam hal permodalan cukup terbantu dengan adanya 13 (tigabelas) KUD dan 4 (empat) Non KUD serta 5(lima) Bank. Untuk jaringan irigasi keseluruhan lahan sawah sebesar 13.637 Ha yang ada sudah menggunakan jaringan irigasi teknis untuk 4.465 Ha, irigasi 1/2 teknis untuk 8.695 Ha dan irigasi sederhana untuk 207 Ha. Sedangkan untuk sarana kelembagaan, di Wilayah Pembangunan Utara terdapat 255 kelompok tani sebagai media belajar, pemberdayaan, pembinaan dan penyuluhan para petani.

Beranjak pada penjabaran diatas, ketersediaan sarana prasarana penunjang untuk mendukung pengembangan wilayah agribisnis di Wilayah Pembangunan Utara meskipun cukup memadai namun masih diperlukan adanya peningkatan/pengembangan.

Peningkatan sarana prasarana sudah seharusnya mendapat perhatian khusus Pemerintah Daerah karena adanya peningkatan sarana prasarana yang ada akan berbanding lurus dengan peningkatan hasil pertanian dan ini juga berarti peningkatan tingkat pendapatan masyarakat petani di Wilayah Pembangunan Utara Kabupaten Tabalong. Selain itu adanya peningkatan sarana prasarana disuatu wilayah akan membuat penurunan jumlah migrasi

penduduk keluar yang terjadi di wilayah tersebut.

c. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengembangan Wilayah Agribisnis di Wilayah Pembangunan Utara

Dalam upaya untuk mengembangkan Wilayah Pembangunan Utara menjadi wilayah agribisnis tentunya dilakukan akselerasi pembangunan yang menunjang. Namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan wilayah agribisnis di Wilayah Pembangunan Utara.

• Kendala Pengembangan Wilayah Agribisnis di Wilayah Pembangunan Utara Dilihat dari Faktor Migrasi Penduduk

Berdasarkan hasil evaluasi pengembangan wilayah agribisnis dilihat dari faktor migrasi penduduk yang telah dijelaskan sebelumnya, banyaknya penduduk yang masuk ke pusat pengembangan wilayah (Kecamatan Muara Uya) menunjukkan ketidakmerataan pertumbuhan/pembangunan antar wilayah di Kecamatan-Kecamatan yang berada di Wilayah Pembangunan Utara.

Selain permasalahan yang mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan/pertumbuhan wilayah tersebut, juga masih terdapat kendala lain dalam pengembangan wilayah agribisnis dilihat dari migrasi penduduk yang terjadi di Wilayah Pembangunan Utara, kendala-kendala tersebut diungkapkan Ir. Haryadi Hasni, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tabalong:

“Adanya migrasi penduduk yang terjadi di Wilayah Pembangunan Utara khususnya migrasi penduduk yang cenderung berpusat ke Kecamatan Muara Uya menimbulkan beberapa kendala yaitu (1) Ketidakmerataan besarnya penduduk dibandingkan ketersediaan lahan pekerjaan yang kurang, (2) Data kependudukan bermasalah, (3) Migrasi dalam jumlah yang besar

untuk daerah tujuan apabila tidak terkontrol akan menimbulkan kepadatan penduduk dan tentunya berpotensi pula meningkatkan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan serta tingkat kriminalitas”. (Wawancara Peneliti, 22 Mei 2012)

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan diatas dibutuhkan peran dari Pemerintah Daerah untuk mengontrol migrasi penduduk yang terjadi salah satunya dengan cara pengembangan, peningkatan dan pembangunan sarana prasarana atau fasilitas-fasilitas "perkotaan" di perdesaan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi penduduk melakukan perpindahan dari "desa" ke "kota" dan mendorong penduduk untuk tetap tinggal di "Desa".

• Kendala Pengembangan Wilayah Agribisnis di Wilayah Pembangunan Utara Dilihat dari Faktor Potensi Ekonomi

Berdasarkan hasil evaluasi pengembangan wilayah agribisnis dilihat dari faktor potensi ekonomi yang telah dijelaskan sebelumnya, sektor pertanian dan perkebunan merupakan sektor yang menjadi potensi ekonomi utama masyarakat di Wilayah Pembangunan Utara. Meskipun potensi ekonomi yang ada telah dinilai mampu membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakatnya serta mengurangi tingkat pencari kerja yang ada, akan tetapi masih ada beberapa kendala yang harus diatasi dan upaya yang harus dilakukan agar potensi ekonomi yang ada dapat memberikan kontribusi lebih maksimal terhadap daerah pada umumnya dan masyarakat di Wilayah Pembangunan Utara pada khususnya. Hal ini diungkapkan Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tabalong :

“Secara umum sektor pertanian dan perkebunan di Wilayah Pembangunan Utara telah dapat memberikan kontribusi positif

terhadap daerah dan tingkat pendapatan masyarakatnya. Tetapi sebenarnya hasil ini masih bisa ditingkatkan lagi apabila dapat mengatasi beberapa kendala yang dihadapi. Kendala tersebut meliputi masalah sumber daya manusia, permodalan, produktivitas, distribusi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian". (Wawancara Peneliti, 22 Mei 2012).

- **Kendala Pengembangan Wilayah Agribisnis di Wilayah Pembangunan Utara Dilihat dari Faktor Sarana Prasarana**

Kondisi sarana dan prasarana pendukung Wilayah Pembangunan Utara kaitannya dengan pengembangan wilayah berbasis agribisnis menunjukkan masih adanya keterbatasan. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada antara lain meliputi kondisi irigasi yang masih kurang dan membutuhkan perbaikan, kondisi jalan yang kurang baik, minimnya kuantitas transportasi dan sarana-sarana pendukung lainnya seperti sarana pengolahan serta sarana pemasaran yang masih dirasa belum cukup menunjang dalam pelaksanaan pengembangan agribisnis

Camat Haruai, Akhmad Hamidi, S.Sos mengungkapkan :

"Salah satu faktor penghambat pengembangan wilayah agribisnis di Kecamatan Haruai dan juga di Kecamatan yang termasuk dalam Wilayah Pembangunan Utara adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pertanian seperti akses jalan, minimnya kuantitas transportasi, sarana pengolahan, sarana pemasaran dll. Apabila sarana dan prasarana pendukung ini dapat diatasi maka pelaksanaan pengembangan wilayah agribisnis akan berjalan dengan baik". (Wawancara Peneliti, 15 Mei 2012).

Keterbatasan sarana dan prasarana merupakan faktor penghambat pengembangan agribisnis yang perlu diatasi. Sarana dan prasarana merupakan

faktor yang mendukung tercapainya keberhasilan pengembangan agribisnis mulai dari produksi hingga pemasaran. Oleh karena itu, masalah sarana prasarana ini harus mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Daerah yang mana Pemerintah Daerah melalui instansi terkait dapat mengatasi permasalahan ini dengan mengeluarkan kebijakan ataupun akselerasi program yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana pendukung dalam pelaksanaan pengembangan wilayah agribisnis di Wilayah Pembangunan Utara.

- **Kendala Pengembangan Wilayah Agribisnis di Wilayah Pembangunan Utara Dalam Aspek Manajemen**

Permasalahan manajemen yang dihadapi dalam pengembangan Wilayah Pembangunan Utara adalah kurangnya sosialisasi mengenai program pengembangan wilayah agribisnis yang dibuat oleh Pemerintah. Selain itu, meskipun kebijakan pemerintah melalui program-program khusus dalam menunjang pengembangan wilayah agribisnis sudah dilaksanakan (adanya pelatihan/penyuluhan dan adanya rencana penanganan masalah) namun ternyata hal tersebut masih menimbulkan permasalahan lain di lapangan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas diperlukan adanya sosialisasi program-program yang direncanakan pemerintah kepada masyarakat khususnya petani dengan lebih luas. Selain itu, kegiatan-kegiatan penyuluhan hendaknya berkaitan dengan kebutuhan informasi petani, sehingga petani memiliki visi yang sama dan jelas untuk mendukung pengembangan kawasan agropolitan. Disisi lain, masih diperlukan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Daerah dalam mendukung pengembangan wilayah agribisnis di Wilayah Pembangunan Utara. Diharapkan kebijakan tersebut lebih efektif, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

- **Kendala Pengembangan Wilayah Agribisnis di Wilayah Pembangunan Utara Dalam Aspek Hukum**

Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang disebutkan bahwasannya :

"Pengembangan kawasan agropolitan harus memiliki landasan hukum yang kuat. Landasan hukum yang diperlukan meliputi tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan".

Di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri sampai saat ini belum ditemukan adanya peraturan yang merupakan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan kawasan agropolitan. Demikian pula di Kabupaten Tabalong, landasan hukum tersebut masih berupa *draft*/konsep.

Aspek hukum merupakan salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong. Selain landasan hukum berupa peraturan daerah tentang Penataan Ruang/Rencana Tata Ruang dan Wilayah diperlukan pula pedoman pelaksanaan program serta penyusunan strategi pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Tabalong dalam bentuk *Master Plan* Kawasan Agropolitan, hal ini sangat diperlukan dalam upaya menunjang dan untuk kelancaran pelaksanaan pengembangan wilayah pertanian/kawasan agropolitan di Kabupaten Tabalong.

6. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian dan hasil analisis data pada bagian terdahulu, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 1) Evaluasi Pengembangan Wilayah dalam meningkatkan kawasan agropolitan di Wilayah Pembangunan Utara Kabupaten Tabalong berjalan cukup baik. Pengembangan wilayah agribisnis yang ada dipengaruhi oleh 3(tiga) faktor utama yaitu Migrasi Penduduk, Potensi Ekonomi dan Sarana Prasarana. a. Faktor Migrasi Penduduk Faktor ekonomi merupakan faktor utama terjadinya migrasi penduduk ke pusat pengembangan Wilayah Pembangunan Utara. Semakin tinggi migrasi penduduk

keluar yang terjadi menandakan rendahnya potensi ekonomi dan minimnya sarana prasarana di wilayah tersebut dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah migrasi penduduk keluar yang terjadi menandakan tingginya potensi ekonomi dan tersedianya sarana prasarana yang memadai di wilayah tersebut. b. Faktor Potensi Ekonomi Potensi ekonomi dari sektor pertanian dan perkebunan membantu penurunan angka pencari kerja di Wilayah Pembangunan Utara sebesar 1,8%. Hal ini juga menandakan semakin tingginya potensi ekonomi suatu wilayah maka akan berdampak pada semakin tinggi pula tingkat pendapatan/perekonomian masyarakat dan semakin rendahnya tingkat pengangguran yang ada. c. Faktor Sarana Prasarana Peningkatan sarana prasarana akan berbanding lurus dengan peningkatan hasil pertanian dan ini juga berarti peningkatan tingkat pendapatan masyarakat petani di Wilayah Pembangunan Utara Kabupaten Tabalong. Selain itu adanya peningkatan sarana prasarana disuatu wilayah akan membuat penurunan jumlah migrasi penduduk keluar yang terjadi di wilayah tersebut.

Kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pengembangan wilayah dalam meningkatkan kawasan agropolitan di Wilayah Pembangunan Utara Kabupaten Tabalong : a. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan wilayah agribisnis dilihat dari faktor migrasi penduduk meliputi ketidakmerataan besarnya penduduk dibandingkan dengan ketersediaan lahan pekerjaan yang ada, adanya ketidakakuratan data jumlah penduduk dan migrasi yang terjadi untuk daerah tujuan apabila tidak terkontrol akan menimbulkan kepadatan penduduk sehingga berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan serta tingkat kriminalitas. Sedangkan untuk daerah yang ditinggalkan berdampak negatif dengan berkurangnya tenaga kerja terampil dan mempunyai keahlian. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan wilayah agribisnis dilihat dari faktor potensi ekonomi meliputi masalah sumber daya manusia, permodalan, produktivitas,

distribusi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Teratasinya masalah yang satu akan dapat membantu dalam mengatasi masalah lainnya. Adanya keterkaitan antar masalah ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan agribisnis diperlukan adanya keterpaduan pengembangan agribisnis. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan wilayah agribisnis dilihat dari faktor sarana prasarana adalah adanya keterbatasan sarana dan prasarana penunjang yang ada. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan wilayah agribisnis dalam aspek manajemen adalah kurangnya sosialisasi Pemerintah dalam program pengembangan wilayah agribisnis di Wilayah Pembangunan Utara. Selain itu, kebijakan pemerintah melalui program-program khusus dalam menunjang pengembangan wilayah agribisnis dinilai belum terlalu efektif. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan wilayah agribisnis dalam aspek hukum di Wilayah Pembangunan Utara adalah belum ditemukan adanya peraturan yang merupakan landasan hukum yang kuat (Peraturan Daerah atau pedoman pelaksanaan berupa *Master Plan*) bagi pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Tabalong.

Daftar Pustaka

Buku-Buku:

- Adisasmita, Rahardjo. 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi VI*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong. 2011. *Tabalong Dalam Angka 2011*. Tanjung.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong. 2006. *Tabalong Dalam Angka 2005/2006*. Tanjung.
- Crawford, John. 2000. *Ed. 2. Evaluation of Libraries and information Services*. London : Aslib, The Association for Information Management and Information Management International.
- Departemen Pertanian. 2003. *Pedoman Operasional Pengembangan Kawasan Agropolitan*. Jakarta.
- Direktorat Pengembangan Kawasan Ditjen Penataan Ruang Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. 2002. *Pendekatan dan Program Pengembangan Wilayah. Bulletin Kawasan*. Jakarta.
- Direktorat Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi. 2003. *Penyusunan Strategic Development Regions (SDR)*. Jakarta.
- Djaali dan Pudji Muljono. 2008. *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta : Grasindo
- Echols, John M dan Shadily, Hassan.2000. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta : Gramedia
- Friedman and Allonso, 1975, *Regional Policy Readings in Theory and Applications*. Cambridge : MIT Press.
- Friedman, John & Weaver, Clyde. 1979. *Territory & Function - The Evolution of Regional Planning*. London: Edward Arnold.
- Hirschman, Albert O. 1968. *The Strategy of Economic Development*. New Haven and London: Yale University Press.
- Jayadinata, Johara T. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*. Bandung : ITB.
- Jones, Charles O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada.
- Kartasasmita, Ginarnjar. 1996. *Era Baru Pembangunan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

- Lay, Cornelis. 1993. *Ketimpangan dan Keterbelakangan di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Politik dan Sosial UGM.
- Mercado, R.G. 2002. *Regional Development in The Philippine: A Review of Experience, State of The Art and Agenda for Research and Action*, Discussion Paper Series. Phillipine Institute for Development Studies.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Remadja Karya.
- Muljana, B.S. 2001. *Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta : UI Press
- Ndraha, Taliziduhu. 2002. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta:Rineka Cipta
- Nugroho, Iwan dan Rochmin Dahuri. 2004, *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
- Pamudji, S. 2001. *Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Stufflebeam, L.D. & Shrinkfield, J. 1985. *Systematic Evaluation: A Self-Instructional Guide to Theory and Practice*. New York: Kluwer Nijhoff Publishing.
- Taneko, Soleman B. 2001. *Dinamika Masyarakat Transisi*. Bandung: Pustaka Pelajar
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1997. *Migrasi, Urbanisasi dan Pasar Kerja di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Widoyoko, Eko Putro. 2009. *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Winardi, J. 2000. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Rineka
- Yusuf, Farida. 2008, *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Penelitian/Publikasi Ilmiah :*
- Lingga, Paul Christian, 2010. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Dairi dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Berbasis Agribisnis*. Universitas Sumatera Utara.
- Purnama, Setya Wahyu. 2004. *Pervilayaban Pengembangan Usaha Tani Berbasis Agribisnis di Kabupaten Bantul - D.I. Yogyakarta*. Universitas Diponegoro.
- Suyatno, Yulistyo. 2008. *Penguatan Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Peningkatan Daya Saing Produk Agribisnis Unggulan*. Universitas Diponegoro.